

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG *OVERMACHT* DAN AKIBAT
HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN SEWA-MENYEWA
PERLENGKAPAN RESEPSI PERNIKAHAN AKIBAT *COVID-19*
(Studi Pada *Wedding Organizer* Amin Salon Desa Adiluwih Kecamatan
Adiluwih Kabupaten Pringsewu)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

AHMAD FARISYI RELINDRANATA

NPM.1621030288

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1442H / 2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG *OVERMACHT* DAN AKIBAT
HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN SEWA-MENYEWA
PERLENGKAPAN RESEPSI PERNIKAHAN AKIBAT *COVID-19*
(Studi Pada *Wedding Organizer* Amin Salon Desa Adiluwih Kecamatan
Adiluwih Kabupaten Pringsewu)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

AHMAD FARISYI RELINDRANATA
NPM.1621030288

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. Siti Mahmudah, S.Ag.,M.Ag.

Pembimbing II : Eti Karini, S.H., M.Hum

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTANLAMPUNG
TAHUN 1442 H / 2020 M**

ABSTRAK

Sewa-menyewa adalah akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa sesuai dengan perjanjian. Namun terkadang dalam proses pemenuhan terdapat suatu hal yang tidak dapat dilakukan seperti yang terjadi pada *Wedding Organizer* Amin Salon Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. Dimana adanya *overmacht* yang mengharuskan masyarakat untuk melakukan *lockdown* akibat pandemi *covid-19*. Pandemi tersebut mengakibatkan tertundanya pemenuhan prestasi. Dalam hal ini terdapat beberapa pihak yang dirugikan akibat pembatalan perjanjian sewa-menyewa yang disebabkan oleh keadaan *overmacht*.

Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana akibat hukum dari *overmacht* yang disebabkan oleh terjadinya pandemi *covid-19* pada *Wedding Organizer* Amin Salon Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu? Dan Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang *overmacht* tersebut? Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui akibat hukum dari *overmacht* yang disebabkan oleh terjadinya pandemi *covid-19* pada *Wedding Organizer* Amin Salon Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang *overmacht* tersebut.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field reseach*) dan penelitian pustaka (*library reseacrh*) sebagai pendukung dalam penelitian ini. Metode dalam penelitian ini bersifat deskriptif *analisis*. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola *Wedding Organizer* Amin Salon dan beberapa pengguna jasa *wedding organizer* yang berhubungan dengan pembatalan perjanjian sewa-menyewa perlengkapan pernikahan. Analisis dengan melakukan analisis *kualitatif* dengan menggunakan metode cara berfikir *induktif*.

Berdasarkan hasil penelitian akibat hukum dari *overmacht* yang disebabkan oleh terjadinya pandemi *covid-19* pada *Wedding Organizer* Amin Salon Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu mengakibatkan *Wedding Organizer* Amin Salon Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu tidak dapat dituntut ganti rugi atau hilangnya hak kreditur atas pemenuhan prestasi pada debitur dan keadaan memaksa yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terlambatnya pelaksanaan prestasi. *Overmacht* yang bersifat sementara tidak menghapuskan perjanjian, tetapi hanya menunda pemenuhan prestasi. Tinjauan hukum Islam tentang *overmacht* karena adanya *covid-19* diperbolehkan karena proses *fasakh* atau pembatalan tersebut lebih banyak kemaslahatan. adanya *uzur* sebagai berakhirnya sewa menyewa yang diakibatkan karena suatu halangan yang membuat perjanjian tidak mungkin terlaksana sebagaimana mestinya. Dengan berakhirnya suatu sewa menyewa ada kewajiban bagi penyewa untuk menyerahkan barang yang disewanya. Tetapi bagi barang-barang tertentu seperti rumah, hewan dan barang lainnya. Dalam hal ini Amin Salon telah melaksanakan kewajiban dalam *uzur* yaitu menyerahkan barang yang disewanya berupa cinderamata mahar pernikahan dan *catering*.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Farisyi Relindranata
Npm : 1621030288
Jurusan/Prodi : Muamalah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang *Overmacht* Dan Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa Perlengkapan Resepsi Pernikahan Akibat Covid-19 (Studi Pada *Wedding Organizer* Amin Salon Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)”** adalah benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyomotan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 05 Oktober 2020

Penulis



Ahmad Farisyi Relindranata
NPM.1621030288



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang *Overmacht* Dan Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa Perlengkapan Resepsi Pernikahan Akibat *Covid-19* (Studi pada *Wedding Organizer* Amin Salon Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)

Nama : Ahmad Farisyi Relindranata

Npm : 1621030288

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan di pertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag
NIP. 196706041997032004

Pembimbing II

Eti Karini, S.H., M.Hum
NIP. 197308162003122003

Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang *Overmacht* Dan Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa Perlengkapan Resepsi Pernikahan Akibat *Covid-19* (Studi Pada *Wedding Organizer* Amin Salon Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu).** Disusun oleh : **Ahmad Farisyi Relindranata**, NPM: 1621030288, program studi : **Mu'amalah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Tim Dewan Penguji

Ketua penguji : **Juhratul Khulwah, M.S.I**

(.....)

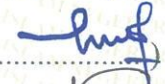
Sekretaris : **Muslim, S.H.I., M.H.I**

(.....)

Penguji Utama : **Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H**

(.....)

Penguji pendamping I : **Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.**

(.....)

Penguji Pendamping II : **Eti Karini, S.H., M.Hum.**

(.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**


Dr. H. Khairuddin M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ بَعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا ، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ،
فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْتَأْ خُدْمَنَهُ نِيءً ، بِمَ تَأْ خُذُ مَالَ أَخِيكَ بغيرِ حَقٍّ ؟¹

“Jika engkau menjual buah kepada saudaramu, lalu terkena bencana, maka tidak halal
bagimu mengambil sesuatu pun darinya.
Dengan (imbalan) apa engkau mengambil harta
saudaramu dengan tanpa hak?”

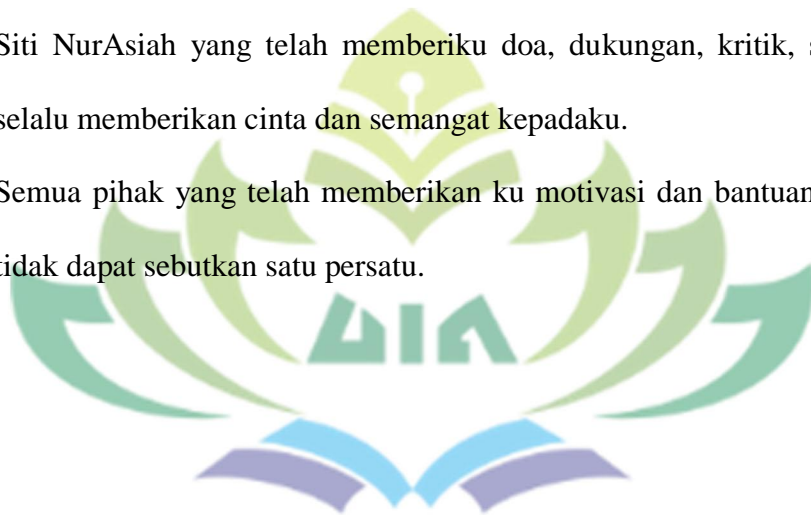


¹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Vol. III, (Beyrouth: Dar al-Fikr, 1993), h. 33.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang tersayang:

1. Ayahanda tercinta Yanda Liswardy S.H dan Ibunda tercinta Bunda Reni Puspita SP.d. serta adikku tercinta M. Hafiz Relindranata yang tak pernah lelah untuk mendoakanku setiap waktu, mendukung, mensuport serta memberikan motivasi dan kasih sayangnya. Tak luput juga dengan pengorbanan yang tak ternilai dan tak terbalas.
2. Siti NurAsiah yang telah memberiku doa, dukungan, kritik, saran, serta selalu memberikan cinta dan semangat kepadaku.
3. Semua pihak yang telah memberikan ku motivasi dan bantuan yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu.



RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap Ahmad Farisyi Relindranata. Dilahirkan pada tanggal 24 Juli 1998 di Kelurahan Gapura, Kecamatan Gapura, Kabupaten Kotabumi. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara buah perkawinan Bapak Liswardy, S.H dan Ibu Reni Puspita, S.Pd.

Pendidikan dimulai dari TK Depak 2003-2004, Sekolah Dasar Muhammadiyah Bandar Lampung 2004-2010, Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 Bandar Lampung 2010-2013, Sekolah Menengah Atas Negeri 02 Bandar Lampung 2013-2016 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program (S1) dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2016 / 2017.



Bandar Lampung, 05 Oktober 2020
Yang Membuat,

Ahmad Farisyi Relindranata

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang *Overmacht* Dan Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa Perlengkapan Resepsi Pernikahan Akibat *Covid-19*”. Karya ilmiah ini disusun guna melengkapi serta memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syariah Jurusan Muamalah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Shalawat serta salam tidak lupa saya haturkan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, para sahabat dan juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Saya menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M.Ag, selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.SI Selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

4. Ibu Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Eti Karini, S.H., M.Hum selaku pembimbing II yang telah banyak memotivasi dan meluangkan waktu untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
 5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah khususnya Program Studi Muamalah, atas ilmu dan didikan yang telah diberikan.
 6. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah Dan Perpustakaan Pusat Uin Raden Intan Lampung.
 7. Sahabat-sahabat terbaikku Aben, Jodi, Ndey yang tidak lelah menghambat skripsiku serta Nuyy yang selalu menghibur, menyemangati dan memotivasi setiap harinya.
 8. Sahabat seperjuanganku Jurusan Muamalah angkatan 2016 khususnya kelas A dan kelas B serta teman-teman KKN 03'16 yang telah memberikan banyak cerita, kebersamaan dan semangat.
 9. Semua pihak yang membantu dan terlibat dalam perjalanan kehidupanku.
- Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan saya terima dengan tangan terbuka dan ucapkan terimakasih. Namun demikian, saya berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan saya pada khususnya.

Bandar Lampung, 05 Oktober 2020

Penulis

Ahmad Farisyi Relindranata
NPM.1621030288

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | iii |
| SURAT PERNYATAAN | iv |
| PERSETUJUAN..... | v |
| PENGESAHAN | vi |
| MOTTO | vii |
| PERSEMBAHAN..... | viii |
| RIWAYAT HIDUP | ix |
| KATA PENGANTAR..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| DAFTAR TABEL..... | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xv |

BAB I : PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Penegasan Judul..... | 1 |
| B. Alasan Memilih Judul..... | 4 |
| C. Latar Belakang Masalah | 5 |
| D. Fokus Penelitian | 10 |
| E. Rumusan Masalah | 11 |
| F. Tujuan Penelitian..... | 11 |
| G. Signifikasi Penelitian..... | 11 |
| H. Tinjauan Pustaka | 12 |
| I. Metode Penelitian..... | 15 |

BAB II : KAJIAN TEORI

| | |
|---|----|
| A. <i>Overmacht</i> | 22 |
| 1. Pengertian <i>Overmacht</i> | 21 |
| 2. <i>Overmacht</i> Dalam Islam | 23 |
| 3. Syarat Terjadinya <i>Overmacht</i> | 28 |
| 4. Resiko Dalam <i>Overmacht</i> | 29 |
| 5. Mekanisme Penyelesaian Akibat Hukum Dalam Perjanjian Dengan Alasan <i>Overmacht</i> | 33 |
| B. Sewa-menyewa dalam Islam | 37 |
| 1. Pengertian Dan Dasar Hukum Sewa-Menyewa | 37 |
| 2. Rukun Dan Syarat Sewa Menyewa | 42 |
| 3. Macam-Macam Sewa-Menyewa | 47 |
| 4. Hikmah Sewa-Menyewa | 49 |
| 5. Bekahir Sewa Menyewa | 50 |

BAB III : LAPORAN HASIL PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. <i>Wedding Organizer</i> Amin Salon Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. | 53 |
| 1. Gambaran Umum <i>Wedding Organizer</i> Amin Salon | 53 |
| 2. Gambaran Umum Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu | 58 |
| B. Pelaksanaan Akibat Hukum Pembatalan Sewa Menyewa Perlengkapan Pernikahan Dalam <i>Overmacht</i> Karena Adanya <i>covid-19</i> Pada <i>Wedding Organizer</i> Amin Salon Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu..... | 69 |

BAB IV : ANALISIS DATA

| | |
|---|----|
| A. Akibat Hukum Dari <i>Overmacht</i> Yang Disebabkan Oleh Terjadinya Pandemi <i>Covid-19</i> Pada <i>Wedding Organizer</i> Amin Salon Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu | 78 |
| B. Tinjauan Hukum Islam Tentang <i>Overmacht</i> Karena Adanya <i>Covid-19</i> Pada <i>Wedding Organizer</i> Amin Salon Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu..... | 82 |

BAB V : PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan | 91 |
| B. Rekomendasi | 92 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Lembar ACC Skripsi

Lampiran 2 : Blangko Konsultasi

Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 4 : Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 5 : Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 6 : Hasil Turnitin



DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1 : Pengurus <i>Wedding organizer</i> Amin Salon..... | 57 |
| Tabel 2 : Nama Dan Kepala Pekon Kecamatan Adiluwih | 61 |
| Tabel 3 : Jumlah Kependudukan Kecamatan Adiluwih..... | 64 |
| Tabel 4 : Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur | 65 |
| Tabel 5 : Agama Dan Kepercayaan Masyarakat Kecamatan Adiluwih | 67 |
| Tabel 6 : Mata Pencarian Masyarakat Kecamatan Adiluwih | 67 |
| Tabel 7 : Sektor Pendidikan Di Kecamatan Adiluwih | 68 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar memudahkan memahami dan supaya tidak adanya kesalahpahaman dalam mengartikan skripsi ini yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Tentang *Overmacht* Dan Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa Perlengkapan Resepsi Pernikahan Akibat *Covid-19* (Studi pada *Wedding Organizer* Amin Salon Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)** maka akan dijelaskan kata yang terdapat dalam judul skripsi ini sebagai berikut :

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk umat yang beragama Islam.² Serta hukum-hukum yang kewajibannya sudah diatur secara jelas dan tegas dalam Al-Qur'an atau hukum-hukum yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu, misalnya kewajiban zakat, puasa, haji, *syura* dan denda *akilah*.³

2. *Overmacht*

Overmacht berasal dari bahasa Belanda yang berarti suatu keadaan yang merajalela dan menyebabkan orang tidak dapat menjalankan

²Islam Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 17.

³Siti Mahmudah, Reformasi Syari'at Islam (Kritik Pemikiran 'Abd Al-Karim). *Al-Adalah*, Vol 13 No.1 (2016). h. 86.

tugasnya.⁴ Dalam kamus hukum *overmacht* mempunyai arti keadaan memaksa, yaitu keadaan yang menghalangi penunaian perikatan yang membebaskan seseorang dari kewajiban mengganti biaya, kerugian dan bunga. Dan dalam bahasa Prancis disebut dengan istilah *force majeure* yang artinya sama dengan keadaan memaksa.⁵

3. Akibat Hukum

Akibat hukum menurut Soeroso mendefinisikan sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.⁶

4. Pembatalan

Pembatalan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan membatalkan, pernyataan batal.⁷

5. Perjanjian

Perjanjian menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih yang mana berjanji akan mentaati apa yang tersebut di persetujuan itu.⁸

6. Sewa menyewa

Sewa menyewa Menurut bahasa (etimologi), sewa menyewa berarti *Al'iwadl* yang artinya ganti dan upah (imbalan). Menurut istilah

⁴S. Wujowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia* (Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoevo, 1990) h. 478.

⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 425.

⁶ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) h. 295.

⁷ Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-1 (Surabaya: Karya Abditama, 2001) h. 120.

⁸ WJS. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986) h. 402

(terminologi), sewa menyewa adalah memberikan suatu barang atau benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan orang yang menerima, dimana orang yang menerima barang itu harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang atau benda tersebut dengan rukun dan syarat tertentu.⁹

7. Resepsi

Resepsi adalah pertemuan (perjamuan) resmi yang diadakan untuk menerima tamu (pada pesta perkawinan atau pelantikan).¹⁰

8. Pernikahan atau Perkawinan

Pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹

9. Covid-19

Covid-19 atau virus corona adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2, pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan, di Provinsi Hubei Cina pada Desember 2019.¹²

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa maksud judul ini adalah akibat hukum pada pembatalan perjanjian sewa-menyewa perlengkapan resepsi pernikahan pada saat *covid-19* yang dilakukan karena

⁹ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Lampung: Permatanet, 2014) h. 133

¹⁰ *Ibid.*, h. 2100

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

¹² <https://bangka.trimbunnews.com/2020/03/24/pengertian-lengkap-apa-itu-virus-corona-covid-19-gejala-cara-penularan-hingga-pencegahan> (11 Juni 2020)

overmacht di *wedding organizer* Amin Salon Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis memilih judul skripsi penelitian **Tinjauan Hukum Islam Tentang *Overmacht* Dan Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa Perlengkapan Resepsi Pernikahan Akibat *Covid-19* (Studi pada *Wedding Organizer* Amin Salon Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)** adalah sebagai berikut:

1. Alasan objektif

Melihat munculnya masalah pada penggunaan jasa *wedding organizer* namun tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan dalih menghindari adanya kerugian pada salah satu pihak pada saat pandemi *covid-19*. *Overmacht* tersebut dilakukan dengan cara tidak menerapkan akad atau perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini menimbulkan spekulasi bahwa hanya menguntungkan salah satu pihak, sehingga penelitian ini dianggap perlu dengan menganalisis dari sudut pandang hukum Islam.

2. Alasan subjektif

Ditinjau dari aspek pembahasan judul penelitian ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, serta banyaknya teori dan literatur yang mempermudah dalam proses penyelesaiannya.

C. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan janji nikah yang dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan pernikahan secara norma agama, dan norma hukum. Pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi tradisi, di zaman modern ini, sebagian besar calon pengantin akan menyelenggarakan sebuah pesta pernikahan dalam rangka menyambut peristiwa penting tersebut.

Wedding organizer adalah suatu jasa yang berfungsi secara pribadi untuk membantu calon pengantin dan keluarga dalam perencanaan dan *supervisi* pelaksanaan rangkaian acara pesta pernikahan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dengan beriringnya waktu, penggunaan jasa *wedding organizer* sangat membantu calon pengantin dalam mempersiapkan hari baik mereka khususnya bila calon pengantin atau keluarga sibuk terkait dengan aktivitas pekerjaan yang tinggi sehingga sulit menyisakan waktu yang cukup untuk menyiapkan sendiri segala perencanaan dan kebutuhan atau perlengkapan sebuah pesta pernikahan yang tersedia beraneka ragam pilihan.

Pada dasarnya pernikahan atau perkawinan merupakan dasar awal untuk membentuk keluarga yang utuh dan bahagia seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa definisi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2, memberikan definisi perkawinan atau pernikahan sebagai akad yang sangat kuat

atau *miitsaaqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹³

Puncak dalam suatu acara pernikahan adalah dengan diadakannya suatu acara syukuran atau perayaan yang dilakukan baik secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran dengan mengundang sanak saudara dan tetangga. Pelaksanaan syukuran atau bisa disebut juga dengan pesta perkawinan (*walimah urusy*) hukumnya merupakan sunnah tentang besar kecilnya acara tergantung kemampuan suami.

Pada beberapa acara pernikahan peran *wedding organizer* sangatlah penting guna untuk memeriahkan acara pertemuan atau perkumpulan pada sebuah pesta pernikahan. Maka pihak yang ingin melangsungkan sebuah pernikahan dengan pihak pengelola *wedding organizer* melakukan perjanjian hubungan kerja sama berupa sewa-menyewa perlengkapan resepsi pernikahan. Dalam sewa-menyewa tersebut terdapat perjanjian ijab dan kabul yang disepakati oleh kedua belah pihak. Istilah perjanjian dalam hukum Islam disebut dengan akad. Akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan atau melaksanakan suatu akibat hukum pada objeknya.¹⁴ Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, akad (العقد) memiliki arti perikatan, perjanjian dan pemufakatan (*Al-Ittifaq*).¹⁵

¹³Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* cet 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) h. 7

¹⁴Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Teori Akad Dalam Fikih Mu'amalah*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 68.

¹⁵Rahmawati Eka Nuraini, Ab Mumin, Akad Jual Beli Dalam Prespektif Fikih dan Praktiknya Dipasar Modal Indonesia, *Jurnal Al-Adalah* Vol. XII, No. 4 Desember 2015

Dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S Al-Maidah (5): 1)¹⁶

Dalam ayat tersebut menjelaskan keharusan memenuhi janji atau ‘akad. kata akad yang berarti janji atau perjanjian, maksudnya adalah perjanjian antara Allah dengan hambanya, hamba dengan dirinya sendiri dan hamba dengan orang lain. Demi terciptanya rasa aman, dan bahagia terhadap manusia dan keharusan untuk saling tolong-menolong di atas kebaikan dan takwa.

Dengan diadakannya suatu perjanjian maka para pihak yang melakukan perjanjian menerima segala akibat hukum yang timbul yakni adanya ikatan yang sangat erat antar pihak. Ikatan yang dimaksud adalah timbulnya hak dan kewajiban baik secara sepihak maupun secara timbal balik. Yang dimaksud dengan hak adalah wewenang yang diberikan hukum subyektif kepada subyek hukum. Kewenangan untuk berbuat sesuatu itulah yang disebut hak. Dengan kata lain hak adalah tuntutan sah, agar orang lain bersikap tidak dengan cara-cara tertentu.¹⁷

¹⁶Q.S Al-Maidah (5): 1

¹⁷Dudu Duswara Machmuddin, *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa* (Bandung: Refika Aditama, 2001), h. 53

Hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak merupakan suatu hubungan hukum yang terjalin antar pihak. Dimana diharuskan adanya pemenuhan prestasi sesuai dengan akad atau perjanjian yang telah diperjanjikan sebelumnya. Suatu akad yang telah dibuat dapat dipandang berakhir apabila telah mencapai tujuannya. Selain tercapainya tujuan, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) karena tidak mendapatnya sebuah izin dari pihak yang berwenang seperti pemerintah.

Seperti yang terjadi pada baru-baru ini bahwa Indonesia sudah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka untuk mengendalikan penyebaran dari pandemi *covid-19* yang mengharuskan seluruh masyarakat untuk meniadakan suatu acara yang mengakibatkan berkumpulnya banyak orang dan juga mengharuskan seluruh pengelola *wedding organizer* untuk menunda atau membatalkan perjanjian resepsi pernikahan dan menerapkan *overmacht*. *Overmacht* adalah suatu keadaan yang merajalela dan menyebabkan orang tidak dapat menjalankan tugasnya.¹⁸ Dalam kamus hukum *overmacht* mempunyai arti keadaan memaksa, yaitu keadaan yang menghalangi penunaian perikatan yang membebaskan seseorang dari kewajiban mengganti biaya, kerugian dan bunga. Dan dalam bahasa *Prancis* disebut dengan istilah *force majeure* yang artinya sama dengan keadaan memaksa.¹⁹

Hal yang terjadi pada *Wedding Organizer* Amin Salon Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, dimana pada *wedding organizer* tersebut tidak dapat melakukan prestasinya dan telah membatalkan semua akad

¹⁸ S. Wujowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*,.... h. 478.

¹⁹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*,.... h. 425.

atau perjanjian yang telah dibuat yang disebabkan karena keadaan memaksa yang menyebabkan suatu hak atau kewajiban dalam suatu hubungan hukum yaitu karena adanya suatu pandemi *covid-19*. Namun dalam hal ini keadaan *overmacht* tersebut dapat mengakibatkan dirugikannya salah satu pihak pembuat akad yaitu pengguna jasa *wedding organizer* Amin Salon Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu karena ketika pembatalan acara resepsi pernikahan tersebut tidak diimbangi dengan memberikannya suatu ganti rugi atau *khiyar* dari uang muka yang telah diberikan pada awal waktu. Sebagaimana pengertian *khiyar* menurut ulama fiqh.

أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَعَاقدِ الْحَقُّ فِيمَضَاءِ الْعَقْدِ أَوْ فسخِهَا إِنْ كَانَ الْخِيَارُ خِيَارَ شَرْطٍ أَوْ رُؤْسَةٍ أَوْ عَيْبًا وَإِنْ يَخْتَارُ أَحَدُ الْبَيْعَيْنِ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ خِيَارَ تَعْيِينٍ.

Artinya : “Suatu keadaan yang menyebabkan aqid memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadilakan atau membatalkannya jika khiyar tersebut merupakan khiyar syarat, ‘aib atau ru’yah, atau hendaklah memilih diantar dua barang jika khiyar ta’yin.”²⁰

Dengan demikian, penulis berargumen praktik *overmacht* resepsi pernikahan akibat *Covid-19* pada *Wedding Organizer* Amin Salon Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu layak untuk di bahas, Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam hal ini, yang penulis teliti terkait dengan praktik *overmacht* resepsi pernikahan akibat *covid-19* dengan melihat adanya perintah dalam Islam bahwa setiap orang harus memenuhi suatu akad atau janji serta

²⁰Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Perdasa, 2016), h.112.

pemberlakuan sebuah ganti rugi atau *khiyar* dalam Islam agar tidak mengakibatkan dirugiankannya salah satu pihak.

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas akibat hukum dari pembatalan sewa-menyewa perlengkapan pernikahan yang terjadi pada *Wedding Organizer Amin Salon* bahwa perjanjian yang dibuat tidak diimbangi dengan hasil seperti sebagai mana mestinya. Fokus dalam penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang *Overmacht* Dan Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa Perlengkapan Resepsi Pernikahan Akibat *Covid-19* (studi pada *Wedding Organizer Amin Salon Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu*). Fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi sub fokus sebagai berikut:

1. Yang menjadi objek penelitian ini adalah pemilik dan pengguna jasa *Wedding Organizer Amin Salon Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu*.
2. Batasan masalah pada penelitian ini adalah keadaan *overmacht* dan akibat hukum terhadap pembatalan perjanjian sewa-menyewa perlengkapan resepsi pernikahan akibat *covid-19* di *Wedding Organizer Amin Salon Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu*.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka pokok masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- A. Bagaimana akibat hukum dari *overmacht* yang disebabkan oleh terjadinya pandemi *covid-19* *Wedding Organizer* Amin Salon Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu?
- B. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang *overmacht* karena adanya *covid-19* pada *Wedding Organizer* Amin Salon Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui akibat hukum dari *overmacht* yang disebabkan oleh terjadinya pandemi *covid-19* *Wedding Organizer* Amin Salon Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang *overmacht* karena adanya *covid-19* pada *Wedding Organizer* Amin Salon Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

G. Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- A. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu memberikan informasi, bahan referensi, serta memberikan pemahaman terkait dengan masalah tindakan *overmacht* dalam penggunaan jasa *wedding organizer* pada saat *covid-19*, yang terjadi di tengah-tengah

masyarakat. Selain itu juga diharapkan menjadi *stimulus* bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

- B. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Tinjauan Pustaka

Dalam skripsi yang ditulis oleh Zikmatun Zakotin (2004) yang Berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Overmacht* Dalam Perjanjian Borongan. Berdasarkan hasil penelitian dalam hukum perdata apabila terjadi *overmacht* maka perjanjian batal apabila *overmacht* bersifat permanen, tetapi apabila *overmacht* bersifat sementara, maka perjanjian berlanjut meskipun pemenuhan prestasi tertunda. Risiko kerugian ditanggung oleh pihak yang menyediakan bahan, didasarkan bahwa seseorang bertanggung jawab terhadap barang miliknya. Demikian juga dalam hukum islam apabila terdapat cacat/aib pada obyek yang diupahkan, maka akad batal, tetapi apabila kerusakan tersebut masih bisa diperbaiki, maka perjanjian tersebut masih bisa berlanjut, meskipun pelaksanaannya tertunda.²¹

Skripsi Nova Noviana yang berjudul *Force Majuer* Dalam Perjanjian Studi Kasus di PT. Bosowa Resources. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perjanjian antara PT. Bosowa Resources dengan CV. Surya Tanete bukan termasuk perjanjian yang mengalami *force majuer*, sehingga mengakibatkan

²¹ Zikmatun Zakotin (2004) Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Overmacht* Dalam Perjanjian Borongan (Yogyakarta: Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004)

perjanjian tidak berakhir dengan sendirinya dan pihak debitur tidak dibebaskan dari tuntutan ganti rugi, sedangkan yang mengalami *force majeure* yang bersifat relatif yakni perjanjian antara PT. Bosowa Resources dengan PT. DA-HA Prima Internasional mengakibatkan perjanjian tetap berjalan hanya pelaksanaannya yang tertunda.²²

Skripsi yang disusun oleh Astri Suryo Nasiti (2013) dengan judul “Analisis *Force Majeur* Di Dalam Suatu Kasus Wanprestasi Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa (Studi kasus Paulus vs PT. Agro Asia Manunggal, Putusan Nomor 14/Pdt.G/2010 PN. Menggala)”. Dalam skripsi ini lebih menegaskan mengenai kriteria *force majeure* atau *overmacht* penggugat dan tergugat sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dasar pertimbangan majelis hakim menolak alasan *force majeure* tergugat dalam perjanjian nomor 014/AAM/2009 antara penggugat dan tergugat.²³

Berkaitan dengan daya paksa, Desy Rebecca Ratu (2017) dalam jurnalnya yang menjelaskan tentang Keadaan Terpaksa Sebagai Bagian Dari Daya Paksa Pasal 48 KUHP (Kajian Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 13 PK/PID.SUS/2014) dalam tulisannya mengemukakan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 PK/Pid.Sus/2014, tanggal 8/4/2014, telah menolak alasan daya paksa/keadaan terpaksa dari Terdakwa sebagai seorang isteri yang menjalankan perusahaan setelah suaminya lumpuh yang mengemukakan bahwa

²²Nova Noviana, *Force Majeur* Dalam Perjanjian (Studi Kasus di PT. Bosowa Resources), *skripsi* (Makasar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2016)

²³Astri Suryo Nasiti, “Analisis *Force Majeur* di Dalam Suatu Kasus Wanprestasi Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa (Studi kasus Paulus vs PT. Agro Asia Manunggal, Putusan Nomor 14/ Pdt.G/ 2010/ PN. Menggala)”, *Skripsi* (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2013)

diterimanya dorongan untuk menjalankan perusahaan merupakan perbuatan terpaksa semata-mata untuk menghindari perusahaan ditutup (pailit) yang akan mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal. Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa dorongan untuk menjalankan perusahaan guna menghindari perusahaan ditutup yang akan mengakibatkan PHK secara massal, bukan merupakan suatu daya paksa/keadaan terpaksa.²⁴

Sedangkan dalam jurnal Nur Sinta dan Saprudin (2016) menerangkan mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *overmacht* dalam perjanjian pemborongan pembuatan irigasi studi kasus di Desa Punti Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima dan hasilnya diketahui bahwa semua perjanjian dibuat secara sah dan berlaku sebagaimana undang undang bagi mereka yang membuatnya. Dan dapat dilihat ketika terjadi *overmacht* tidak menjadi tanggung jawab penerima borongan, pihak penerima borongan boleh melakukan sesuatu terhadap bangunan irigasi yang roboh dan berhak menerima seluruh biaya ganti rugi dari pengguna jasa pemborong (pemberi borongan).²⁵

Peneliti-peneliti sebelumnya telah banyak menganalisa mengenai *overmacht* atau *force majeure* yang ada di masyarakat. Persamaan dari beberapa penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang akibat *overmacht* atau yang biasa disebut dengan *force majeure* pada saat suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya yang disebabkan karena adanya

²⁴ Desy Rebecca Ratu, Keadaan Terpaksa Sebagai Bagian Dari Daya Paksa Pasal 48 KUHP (Kajian Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 13 PK/PID.SUS/2014(2017) Dalam Jurnal *Lex Crimen* Vol. VI/No. 10, Desember 2017.

²⁵ Nur Sinta dan Saprudin Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Overmacht* Dalam Perjanjian Pemborongan Pembuatan Irigasi: Studi Kasus di Desa Punti Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima dalam Jurnal *Muamalat*, Vol VIII, No 2, Desember 2016.

suatu kendala. Namun, perbedaan khusus dan mendasar dari penelitian di atas dengan penelitian ini adalah fokus penelitian ini mengenai akibat hukum dari pembatalan sewa-menyewa perlengkapan pernikahan dalam *overmacht* akibat *covid-19* yang dipertegas menggunakan sewa menyewa dan *khiyar* dalam hukum Islam pada pengguna jasa *wedding organizer*.

I. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *kualitatif*. Yaitu pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen. Dengan pertimbangan metode *kualitatif* lebih mudah apabila berhadapan dengan jamak, menyajikan langsung peneliti dengan responden, dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh.²⁶ Alasan menggunakan metode ini yaitu untuk mengkaji suatu akibat hukum dari pembatalan sewa-menyewa perlengkapan pernikahan dalam keadaan *overmacht* dengan konsep hukum Islam.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.²⁷ Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat terhadap *overmacht* dan akibat hukum pada pembatalan perjanjian resepsi pernikahan akibat *covid-19* pada *Wedding Organizer* Amin Salon Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian pustaka (*Library*

²⁶ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 3.

²⁷ *Ibid.*, h. 9.

Research), sebagai pendukung dalam melakukan penelitian baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.²⁸

2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan oleh karena itu, data yang penulis peroleh akan dianalisa secara deskriptif dan analisa *kualitatif* yaitu dengan mendeskripsikan tentang *overmacht* resepsi pernikahan akibat *covid-19* ditinjau dari Hukum Islam.

3. Sumber Data

Yang melatarbelakangi fokus penelitian yaitu mengarah pada persoalan tinjauan hukum Islam terhadap praktik *overmacht* pernikahan akibat *covid-19*. Oleh karena itu sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Data Primer (*Primary Data*)

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.²⁹ Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari pemilik dan pengguna jasa *wedding organizer* pada Amin salon.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber ini bersifat membantu atau

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 218.

menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.”³⁰ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian tentang pelaksanaan praktik *overmacht* resepsi pernikahan akibat *covid-19*.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa populasi merupakan keseluruhan dari subjek penelitian.³¹ Keseluruhan objek yang diteliti yaitu seperti manusia, benda-benda, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang menjadi objek penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 105 orang yang menggunakan jasa *wedding organizer* yang mendapatkan praktik *overmacht* pada masa pandemi.

b. Sampel

Sampel menurut Suharsimi Arikunto sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.³² Dikarenakan populasi yang di ambil dalam penelitian ini lebih dari 100 maka sampel dalam penelitian antara 10% - 15% atau 20%-25% atau lebih. Maka sampel yang akan diambil sebanyak 10% atau 10 orang pengguna jasa *wedding organizer* yang mendapatkan praktik *overmacht* pada Amin Salon Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 188.

³² *Ibid.*, h. 109.

5. Metode Pengumpulan Data

Sebagai usaha dan langkah dalam menghimpun data untuk penelitian ini maka digunakan beberapa metode, yaitu :

a. *Interview*

Interview (wawancara) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).³³ *Interview* atau wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada para informan yang bisa memberikan informasi berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada beberapa pengelola dan pengguna jasa *wedding organizer* dimana pada praktiknya, penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak-pihak yang mengalami praktik *overmacht* resepsi pernikahan akibat *covid-19* dengan tujuan untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang penulis teliti.³⁴

b. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidik.³⁵ Penulis akan melakukan observasi dengan mengamati akibat hukum dari pembatalan sewa-menyewa perlengkapan pernikahan dalam keadaan *overmacht* akibat *covid-19* pada Amin Salon Desa

³³Abdul Kodir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 86.

³⁴Lexy. J. Moleong, *Metode Pendekatan Kualitatif* (Bandung: Remaja Rusda Karya, 2001), h. 144.

³⁵Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 70.

Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu agar peneliti dapat mengetahui secara langsung terhadap peristiwa yang ada di lapangan mengenai terjadinya praktik *overmacht*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, gambar, majalah, surat kabar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan memfotocopy atau foto menggunakan camera tangan untuk dokumen yang bersifat resmi. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data yang sesungguhnya mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, gambar, majalah, surat kabar, atau karya-karya monumental dari seseorang.³⁶

6. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul baik lapangan maupun perpustakaan kemudian diolah secara sistematis sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul.³⁷
- b. Rekontruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, sesuai logika dan mudah dipahami.

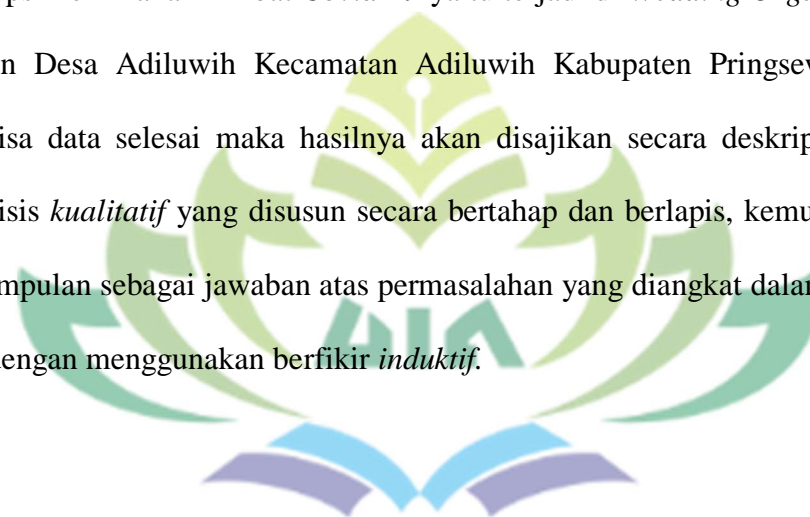
³⁶Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 38.

³⁷Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: LP2M UIN Raden Intan, 2015), h. 122.

- c. Sistematisasi data (*sistematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah/variable penelitian.

7. Metode Analisa Data

Setelah semua data terkumpul maka selanjutnya data akan dianalisa. Metode analisa yang akan digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu Tinjauan Hukum Islam Tentang *Overmacht* Dan Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa Perlengkapan Resepsi Pernikahan Akibat *Covid-19* yaitu terjadi di *Wedding Organizer Amin Salon Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu*. Setelah analisa data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif dengan analisis *kualitatif* yang disusun secara bertahap dan berlapis, kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan berfikir *induktif*.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Overmacht*

1. Pengertian *Overmacht*

Overmacht berasal dari bahasa Belanda yang berarti suatu keadaan yang merajalela dan menyebabkan orang tidak dapat menjalankan tugasnya.³⁸ Dalam kamus hukum *Overmacht* mempunyai arti keadaan memaksa, yaitu keadaan yang menghalangi penunaian perikatan yang membebaskan seseorang dari kewajiban mengganti biaya, kerugian dan bunga. Dalam bahasa Perancis disebut dengan istilah *Force Majeure* yang artinya sama dengan keadaan memaksa.³⁹

Overmacht dalam arti luas berarti suatu keadaan di luar kekuasaan manusia yang mengakibatkan salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat memenuhi prestasinya.⁴⁰ Jadi *Overmacht* ini tidak ada kesalahan dari pihak yang tidak memenuhi prestasinya, sehingga menyebabkan suatu hak atau suatu kewajiban dalam suatu perhubungan hukum tidak dapat dilaksanakan.

Selain dalam KUH Perdata istilah *Overmacht* juga terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), seperti yang disebutkan dalam pasal 48 dan 49 KUHP bahwa seorang tertuduh tidak boleh dihukum jika tindak pidana yang dilakukannya itu dalam *Overmacht*.⁴¹ Jadi dalam hukum

³⁸ S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoevo, 1990), h. 478.

³⁹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 425.

⁴⁰ F.X. Djumaldji, *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996) h. 17.

⁴¹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 51.

pidanapun suatu perbuatan yang *onrechtmatige* (perbuatan melawan hukum), tetapi perbuatan itu dilakukan di bawah tekanan atau pengaruh *Overmacht* melepaskan pelanggar dari tuntutan.

Pasal 1244 dan 1245 tersebut sebagai dasar hukum bagi *Overmacht* sebagai landasan hukum yang membebaskan debitur dari kewajiban melaksanakan pemenuhan (*nakoming*) dan ganti rugi (*schadevergoeding*) sekalipun debitur telah melakukan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi dijelaskan pula pada pasal 1444 (1) dan (4) KUH Perdata yang menjelaskan tentang pemenuhan ganti rugi yang berbunyi :

(1) Jika barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang hingga tak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada, atau tidak, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya. (2) Dengan cara bagaimanapun suatu barang hilang atau musnah, orang yang mengambil barang itu sekali-kali tidak bebas dan kewajiban untuk mengganti harga.”

Itulah sebabnya *Overmacht* disebut sebagai dasar hukum yang memaafkan atau *rechtsvaardigings-ground*.⁴²

⁴² M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Penerbit Alumni: 1982), h. 84.

2. *Overmacht dalam Islam*

Overmacht ini diistilahkan dengan keadaan darurat. Dalam kaidah ushuliyah disebutkan:

الضَّرُّ وَرَأَتْ تُبِيحُ الْمَحْضُورَاتِ

Artinya : “Keadaan darurat membolehkannya hal-hal yang dilarang.”⁴³

Kaidah ini maksudnya adalah apabila dalam suatu keadaan yang memaksa yakni suatu keadaan yang mengharuskan seseorang untuk melakukan sesuatu yang pada hakekatnya dilarang, maka melakukan perbuatan tersebut dibolehkan karena apabila tidak demikian itu akan dapat menimbulkan suatu madharat baginya. Hal tersebut berdasar pada firman Allah SWT yang berbunyi :

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya : “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S Al-Ahzab (30): 5)⁴⁴

⁴³ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'at Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*, Cet.1, Jakarta, Robbani Press, 2008, h.124.

⁴⁴ Q.S Al-Ahzab (30): 5.

Maksud dari ayat tersebut adalah barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang siapa tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas maka tidak ada dosa baginya.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ بَعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا ، فَأَصَابَتْهُ
جَائِحَةٌ ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْتَأْ خُدْمَنَهُ ثِيءً ، بِمَ تَأْ خُذُ مَالَ أَخِيكَ بغيرِ حَقٍّ ؟⁴⁵

Artinya : “Jika engkau menjual buah kepada saudaramu, lalu terkena bencana, maka tidak halal bagimu mengambil sesuatu pun darinya. Dengan (imbalan) apa engkau mengambil harta saudaramu dengan tanpa hak?.”

Hadis di atas menjelaskan konsep *overmacht* berdasarkan ajaran Islam dimana apabila seseorang menjual buah kepada orang lain kemudian terjadi suatu bencana, maka tidak patut atau tidak dihalakan bagi pihak lain untuk dimintai ganti rugi atas kejadian tersebut.

Berdasarkan dalil yang dikemukakan di atas berkaitan juga dengan keadaan terpaksa atau *overmacht* dan menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat dinamis (*harakah*) dalam artian tetap sesuai dengan perkembangan zaman terutama dalam ruang lingkup muamalah.

⁴⁵ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Vol. III, (Beyrouth: Dar al-Fikr, 1993), h. 33.

Pada dasarnya keadaan memaksa dapat dibedakan atas keadaan memaksakan absolut dan keadaan memaksa relatif.

- a) Keadaan memaksa absolut adalah suatu keadaan dimana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangnya (perikatannya) kepada kreditur.⁴⁶

Misalnya A menjual rumah kepada B. Ketika akan dilakukan penyerahan, rumah itu roboh karena gempa, maka dalam hal ini A sama sekali tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada B.

- b) Keadaan memaksa relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya, tetapi pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan pengorbanan yang besar, yang tidak seimbang.⁴⁷

Sebagai contoh, Seorang penyanyi sudah menandatangani kontrak untuk suatu pertunjukan. Ketika akan tampil anaknya sakit keras, sehingga meskipun masih ada kemungkinan untuk memenuhi kontrak, tetapi praktis melalui pengorbanan yang sangat besar.

Perbedaan antara *overmacht* absolut dan *overmacht* relatif merupakan turunan dari teori tentang *overmacht* (keadaan memaksa). Dalam sejarah pemikiran tentang keadaan memaksa, terdapat dua ajaran yaitu:

- a) Ajaran yang objektif (*de objectieve overmachtsleer*) atau *overmacht* absolut.

180 ⁴⁶ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003) h.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 183-184.

- b) Ajaran yang subjektif (*de subjectieve overmachtsleer*) atau *overmacht* relatif.⁴⁸

Dalam *overmacht* yang objektif (*absolut*), pemenuhan prestasi tidak mungkin dilaksanakan oleh siapapun juga (*impossibilitas*). Misalnya jika objek perjanjian musnah karena bencana, maka siapapun orangnya tidak mungkin akan melakukan penyerahan.

Ketentuan tentang ini dapat dibaca dalam Pasal 1444 KUHPdata bahwa Jika barang tertentu yang menjadi objek persetujuan (perjanjian) musnah, tidak lagi dapat diperdagangkan atau hilang sedemikian rupa, sehingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya si berutang (debitur), dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

Pada *overmacht* yang subjektif (relatif), debitur masih mungkin memenuhi prestasi, tetapi dengan kesulitan atau pengorbanan yang besar (*difficulties*). Artinya bahwa debitur dengan mengingat keadaan pribadinya, tidak dapat memenuhi prestasinya. Dalam hal ini ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Ketidakmungkinan untuk memenuhi prestasi dalam perikatan hanya ada pada debitur yang bersangkutan, tidak pada setiap orang.
- b) Secara teoritis pemenuhan prestasi masih mungkin, tetapi praktis menimbulkan banyak kesulitan.

⁴⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994) h. 37.

Overmacht dapat bersifat tetap dan dapat pula bersifat sementara. Jika *overmacht* (keadaan memaksa bersifat tetap, perjanjian berhenti sama sekali.⁴⁹ Misalnya musnahnya barang yang akan diserahkan. Sedangkan jika keadaan memaksa bersifat sementara, perjanjian tidak berhenti sama sekali, melainkan hanya ditunda. Pada saat keadaan memaksa tidak ada lagi, perjanjian berlaku (bekerja) kembali.⁵⁰ Sebagai contoh, adanya larangan mengekspor barang dalam jangka waktu tertentu. Apabila larangan ini dicabut, maka perjanjian kembali mempunyai daya kerja, sehingga prestasi harus dilaksanakan.

Overmacht dapat dikatakan sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, yaitu alasan yang mengakibatkan debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perikatan pokok/asal, tidak diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga.⁵¹ Alasan pembenar adalah alasan yang berhubungan dengan ketidakmampuan objektif dari debitur untuk memenuhi perikatan yang ada. Sedangkan alasan pemaaf adalah alasan yang berhubungan dengan ketidakmampuan subjektif dari debitur dalam memenuhi perikatan. Alasan pembenar termasuk *overmacht* absolut, sementara alasan pemaaf adalah *overmacht* relatif.

⁴⁹ Budiman N.P.D, Sinaga, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005) h. 27.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 28.

⁵¹ Gunawan Widjaja, *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullenrecht) Dalam Hukum Perdata*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) h. 358-359.

3. Syarat Terjadinya *Overmacht*

Berdasarkan pengertian di atas, maka *Overmacht* dapat disimpulkan merupakan peristiwa yang tidak terduga yang terjadi diluar kesalahan debitur setelah penutupan kontrak yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Sebelum pemborong dinyatakan lalai dalam menjalankan prestasinya dan karena tidak dapat dipersalahkan serta tidak menanggung resiko atas kejadian tersebut. Maka, sebagai sarana bagi debitur melepaskan diri dari gugatan kreditur, maka adanya *Overmacht* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pemenuhan prestasi terhalang atau teceguh
- b. Terhalangnya pemenuhan prestasi tersebut di luar kesalahan debitur
- c. Peristiwa yang menyebabkan terhalangnya prestasi tersebut bukan resiko debitur.⁵²

Adanya peristiwa yang dikategorikan sebagai *Overmacht* membawa konsekuensi (akibat hukum), sebagai berikut:

- a. Kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi.
- b. Debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai.
- c. Debitur tidak wajib membayar ganti rugi.
- d. Resiko tidak dapat menuntut pembatalan dalam perjanjian timbal balik.
- e. Perikatan dianggap gugur.⁵³

⁵²Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 272.

Agar debitur dapat mengemukakan adanya keadaan memaksa, harus dipenuhi tiga syarat yaitu:

- a. Ia harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah.
- b. Ia tidak dapat memenuhi kewajibannya secara lain.
- c. Ia tidak menanggung resiko.

Overmacht dapat dinyatakan tidak berhasil, apabila:

- a. *Overmacht* terjadi di luar kesalahan debitur, namun debitur telah dalam keadaan lalai.
- b. Tercegahnya pemenuhan prestasi dapat diduga pada waktu penutupan perjanjian.
- c. Tercegahnya pemenuhan disebabkan kesalahan seseorang yang diikutsertakan dalam melaksanakan perikatan tercegahnya pemenuhan disebabkan oleh cacat-cacat benda yang digunakan debitur dalam melaksanakan perikatannya.⁵⁴

4. Resiko Dalam Overmacht

Overmacht berkaitan erat dengan persoalan resiko. Pengertian resiko dalam hukum perikatan berbeda dengan resiko dalam istilah sehari-hari. Dalam hukum perikatan, istilah resiko mempunyai pengertian khusus. “Resiko adalah suatu ajaran tentang siapakah yang harus menanggung kerugian apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam *overmacht*”.⁵⁵

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*, h. 276

⁵⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*..., h. 39.

Apabila debitur tidak memenuhi prestasi karena kesalahan atau kelalaiannya, maka kerugian dibebankan kepada debitur yang bersangkutan. Akan tetapi lain persoalannya jika tidak dipenuhinya prestasi di luar kesalahan debitur, melainkan karena suatu peristiwa yang tidak diduga sebelumnya. Ajaran resiko menentukan penyelesaian kerugian dalam keadaan memaksa (*overmacht*).

Dalam perjanjian sepihak, resiko dalam hal terjadinya *overmacht* diatur dalam Pasal 1237 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Dalam perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan adalah tanggungan piutang (kreditur)”. Isi pasal ini menentukan bahwa dalam perjanjian sepihak, apabila tidak dipenuhi prestasi karena *overmacht*, maka resiko ada pada kreditur. Di samping itu Pasal 1444 KUHPerdara menentukan pula bahwa “apabila barangnya musnah, tidak lagi dapat diperdagangkan atau hilang, maka perikatan hapus, jika hal itu terjadi di luar kesalahan debitur”. Dalam hal ini, debitur tidak lagi mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi, sehingga kreditur tidak mendapatkan haknya.

Berkenaan dengan resiko dalam perjanjian timbal balik, ketentuan umum dalam buku III KUHPerdara tidak mengatur tentang hal ini. Oleh karena itu penyelesaiannya didasarkan pada asas kepatutan. Asas ini dimuat dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh

kepatutan, kebiasaan dan undang-undang”. Bila para pihak tidak memperjanjikan penyelesaian tentang *overmacht*, maka dapat dipedomani asas kepatutan.

Dalam hal yang berkaitan dengan resiko *overmacht* dalam perjanjian timbal balik, asas kepatutan dapat dibaca dalam ketentuan Pasal 1545 yo Pasal 1553 KUHPerdato. Pasal 1545 KUHPerdato menentukan “Apabila sesuatu barang tertentu yang diperjanjikan musnah di luar salah pemiliknya, maka perjanjian dianggap sebagai gugur dan siapa dari pihakpihak yang telah memenuhi persetujuan dapat menuntut kembali barang yang telah diberikannya dalam tukar menukar”.

Pasal di atas mengatur tentang *overmacht* dalam perjanjian tukar menukar yang merupakan perjanjian timbal balik. Dalam perjanjian tukar menukar, bila barang milik salah satu pihak musnah di luar kesalahannya, maka lawan pihak yang sudah terlanjur menyerahkan barang yang akan ditukarkan dapat menuntut pengembaliannya. Misalnya, A mengadakan perjanjian dengan B untuk tukar menukar seekor sapi dengan 25 gram emas. A sudah menyerahkan 25 gram emas. Ketika B akan menyerahkan sapi, sapi tersebut mati disambar petir. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1545 KUHPerdato, maka A dapat menuntut kembali 25 gram emas yang sudah terlanjur diserahkan.

Apabila ditinjau dari asas kepatutan, maka memang sudah sepantasnya seseorang yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu perjanjian, tidak pula akan menerima kontra prestasi. Demikianlah yang adil dan pantas serta

sejalan ngan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sebaliknya A tidak berhak pula menuntut ganti kerugian.

Selanjutnya Pasal 1553 KUHPerdara mengatur tentang *overmacht* dalam perjanjian sewa menyewa. Pasal 1553 menentukan bahwa “Jika selama waktu sewa barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka perjanjian sewa gugur demi hukum”. Akibat *overmacht* dalam hal ini adalah bahwa perjanjian sewa akan berakhir dengan sendirinya. Misalnya, A menyewa rumah kepada B untuk masa satu tahun. Setelah berjalan enam bulan, rumah itu terbakar di luar salah A sebagai penyewa, maka perjanjian sewa akan berakhir karena itu.

Selain ketentuan Pasal 1545 jo Pasal 1553 KUHPerdara, satu pasal lagi yang mengatur tentang resiko *overmacht* dalam perjanjian timbal balik adalah Pasal 1460 KUHPerdara. Ketentuan pasal ini berbeda dengan apa yang sudah diatur dalam dua pasal sebelumnya. Pasal 1460 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut, “Jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembelian adalah atas tanggungan pembeli meskipun penyerahan belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya”.

Ketentuan Pasal 1460 KUHPerdara membebaskan resiko atas rusak atau musnahnya barang kepada pembeli, meskipun penyerahan belum dilakukan. Dengan demikian, jika barang yang dibeli musnah karena *overmacht* sebelum diserahkan oleh penjual, maka pembeli tetap berkewajiban membayar harga barang tersebut.

Prinsip yang terkandung dalam Pasal 1460 KUHPerdota berbeda bahkan dapat dikatakan bertentangan dengan perjanjian tukar menukar dan sewa menyewa. Apabila ditinjau dari asas kepatutan, tidak patut dan tidak adil orang yang tidak menerima barang, tetapi tetap diharuskan membayar harganya. Oleh karena itu, Pasal 1460 KUHPerdota dihapuskan melalui SE MA No 3 Tahun 1963 tentang Gagasan menganggap KUHPerdota tidak sebagai undangundang. Selanjutnya “di dalam menggunakan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang resiko dalam perjanjian timbal balik, para ahli sepakat untuk menggunakan pasal 1545 jo Pasal 1553 KUHPerdota sebagai pedoman”.⁵⁶

5. Mekanisme Penyelesaian Akibat Hukum Dalam Perjanjian Dengan Alasan *Overmacht*.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁵⁷ Perjanjian tersebut melahirkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁵⁸

Menurut Prof. Subekti, S.H., perkataan mempunyai arti yang lebih luas dari perjanjian, karena perjanjian hanya merupakan salah satu sumber hukum dari perikatan, disamping yang lahir dari Undang-Undang. Perikatan mengandung suatu pengertian abstrak, sedangkan peristiwa hukum yang

⁵⁶ *Ibid.*, h. 43

⁵⁷ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 6.

⁵⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), h. 1.

konkret. Oleh karena itu, perjanjian dan Undang-undang merupakan peristiwa konkret yang melahirkan perikatan sesuatu yang abstrak.⁵⁹

Perjanjian dapat pula diartikan sebagai hubungan antara seseorang yang bertindak sebagai pekerja/buruh dengan seseorang yang bertindak sebagai majikan.⁶⁰ Perjanjian dalam Islam pada dasarnya dapat dilakukan dalam segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum (penyebab munculnya hak dan kewajiban) bagi pihak-pihak yang terkait. Bentuk perjanjian yang terjadi antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian adalah tergantung pada bentuk atau jenis obyek perjanjian yang dilakukan.

Dalam perjanjian yang mengalami *overmacht* debitur tidak melaksanakan prestasi atau wanprestasi bukan disebabkan oleh faktor kesengajaan atau kelalaian, melainkan karena adanya keadaan yang terjadi di luar dugaan dan kemampuan debitur. Hal ini mengakibatkan debitur tidak dapat dituntut ganti rugi atau hilangnya hak kreditur atas pemenuhan prestasi pada debitur dan keadaan memaksa yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terlambatnya pelaksanaan prestasi harus dibuktikan oleh debitur.

Seharusnya dengan adanya keadaan memaksa yang bersifat absolut, maka perjanjian menjadi gugur atau hapus, karena tidak terlaksananya perjanjian di luar kemampuan debitur. Dengan demikian, risiko ditanggung oleh kreditur. Sedangkan apabila keadaan memaksa bersifat relatif, maka status hukum perjanjian masih ada dan tuntutan terhadap pelaksanaan

⁵⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1987), h. 123.

⁶⁰ Wiwoho Soedjono, *Hukum Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 9.

perjanjian demikian masih dapat dilakukan setelah keadaan memaksa tersebut berakhir atau berhenti.⁶¹

Keadaan memaksa yang relatif bersifat sementara. Perikatan tidak berhenti (tidak batal), hanya pemenuhan prestasinya tertunda. Jika kesulitan sudah tidak ada lagi, pemenuhan prestasi diteruskan. Akan tetapi, jika prestasi itu sudah tidak berarti lagi bagi kreditur karena sudah tidak diperlukan lagi, perikatan itu “gugur” (*verval*).⁶²

Pada umumnya perjanjian atau kontrak yang disepakati oleh pihak-pihak kemudian mengalami *overmacht* berakhir dengan sendirinya, namun lain halnya dengan *overmacht* bersifat relatif yang masih dapat melanjutkan pemenuhan prestasi setelah berakhirnya keadaan memaksa. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya perjanjian *force majeure* seringkali memunculkan permasalahan. Masalah yang muncul akibat adanya perbedaan penafsiran oleh pihak kreditur dan debitur mengenai arti *force majeure* pada suatu keadaan yang sedang terjadi dalam proses pemenuhan prestasi oleh debitur, sehingga memunculkan perselisihan antara oleh kedua belah pihak yang jika muncul permasalahan mengenai isi kontrak, berikut ini beberapa cara yang dapat dilakukan para pihak untuk menyelesaikannya.

1. Musyawarah

Ada banyak cara penyelesaian permasalahan kontrak yang dapat dilakukan para pihak. Namun, cara yang paling dianjurkan adalah melalui

⁶¹ Marilang, *Hukum Perikatan: Perikatan yang lahir dari perjanjian* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 138.

⁶² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Sakti, 1990) h. 244.

musyawarah. Pasalnya, melalui musyawarah para pihak dapat bertatap muka dan menyelesaikan permasalahan secara langsung tanpa melalui atau mendapat intervensi dari pihak lain, yang mungkin malah akan menghambat laju informasi dan kemauan yang akan disampaikan oleh masing-masing pihak.

2. Litigasi

Litigasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan dengan mengajukan gugatan ke lembaga pengadilan atas perselisihan atau sengketa yang dialami oleh salah satu pihak yang terikat kontrak. Namun, ada sisi negatif dari penyelesaian perselisihan kontrak melalui cara ini, yaitu umumnya yang terjadi adalah rasa ketidakharmonisan lagi antara pihak yang satu dan yang lain. Jika sebelumnya para pihak merupakan rekan kerja atau teman bisnis yang baik dan saling menguntungkan, menjadi hubungan permusuhan yang saling menjatuhkan dan bahkan tidak jarang akan timbul saling dendam di antara mereka. Selain itu, biaya litigasi tidak murah dan prosesnya memakan waktu yang lama, sehingga memakan tenaga dan pikiran.

3. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif penyelesaian sengketa adalah tata cara penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian

sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternative penyelesaian sengketa tersebut harus diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari dan hasilnya dituangkan di dalam suatu kesepakatan dalam bentuk tertulis. Jika dengan cara tersebut di atas, sengketa atau beda pendapat di atas tidak dapat diselesaikan, atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat dapat diselesaikan melalui bantuan orang atau lebih penasehat ahli atau melalui seorang mediator.

B. Sewa-Menyewa Dalam Islam

1. Pengertian Dan Dasar Hukum Sewa Menyewa

a) Pengertian Sewa-Menyewa

Sewa menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-Ijarah*, berasal dari kata *al-Ajru* menurut bahasa artinya ialah *al-Iwadh*. Dalam bahasa Indonesia diartikan ganti dan upah.⁶³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata sewa mempunyai arti pemakaian sesuatu dengan membayar uang.⁶⁴

Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata *أَجَرَ - يُجَرُّ* (*ajara ya'jiru*) yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *al-Ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna

⁶³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.14.

⁶⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 868.

dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun *immateri*.⁶⁵ Sedangkan menurut bahasa sewa menyewa berasal dari kata sewa dan menyewa, kata sewa berarti pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa.⁶⁶ Sedangkan kata menyewa berarti memakai dengan membayar uang sewa.⁶⁷ Sewa menyewa menurut istilah bahasa Arab adalah *al-ijarah*, yang artinya upah, sewa, jasa atau imbalan.⁶⁸ *Ijarah* secara sederhana diartikan dengan transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.⁶⁹

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa *ijarah* menurut bahasa dan secara syara' memiliki makna jual beli manfaat.⁷⁰ Juhur Ulama Fikih berpendapat bahwa *Ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya melainkan bendanya.⁷¹

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan atas barang itu sendiri.⁷²

⁶⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 101.

⁶⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1057.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 227.

⁶⁹ Amir Syariffuddin, *Garis-Garis Besar Fikih* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 215-216.

⁷⁰ Eka Nuraini Rachmawati, Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia". *Al-Adalah Jurnal Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Vol. XII, No. 4, Desember 2015), h. 793.

⁷¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 122.

⁷² Fatwa DSN-MUI, No. 09/DSN-MUI/IV/2000, *Tentang Pembiayaan Ijarah*.

Secara istilah para ulama mendefinisikan *ijarah* antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Syafi'i dan Imam Taqiyyuddin, mendefinisikan *ijarah* ialah:

عَقْدٌ عَلَى مَنَفْعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَدْلِ
وَالِإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ⁷³

Artinya : “Transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan dengan suatu imbalan tertentu”

- 2) Menurut Malikiyah, mendefinisikan *ijarah* ialah:

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَى مَنَفْعَةِ الْإِنْسَانِيِّ وَبَعْضِ الْمَنْقُولِ⁷⁴

Artinya : “Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”

- 3) Menurut Hambaliyah, *ijarah* ialah:

الْإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى مَنَفْعَةٍ مُبَاحَةٍ مَعْلُومَةٍ تُؤْخَذُ شَيْئاً فَشَيْئاً
مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ⁷⁵

Artinya : “*Ijarah* yaitu akad transaksi atau suatu kemanfaatan yang diperoleh dan telah diketahui yang diambil sedikit demi sedikit pada tempo waktu tertentu serta dengan ganti rugi tertentu.”

⁷³ Imam Taqiyyuddin, *Kifayah al-Akhyar* (Semarang: Toha Putra), h. 309.

⁷⁴ Abdur Rahman al-Jaziry, *Fiqh 'Ala Madzhabil Arba'ah, al Makkabah al-Bukhoiriyah al-Kubra* (Beirut: Dar al-Fikr), h. 94.

⁷⁵ *Ibid.*

b) Dasar Hukum Sewa Menyewa

Dasar-dasar hukum atau rujukan *ijarah* adalah Al-Quran, Al-Sunnah dan *Al-Ijma'*.

1) Al-Qur'an

a) Firman Allah SWT yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah (2): 233)⁷⁶

b) Firman Allah SWT

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ اسْتَعْجِرُهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعَجَرْتَ
الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٣٤﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ بِمَا نَعْبُدُ
هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجْبٍ ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ
عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۖ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ
الصَّالِحِينَ ﴿٢٣٥﴾

Artinya : "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada

⁷⁶ QS. Al-Baqarah (2): 233.

kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik.” (QS. Al-Qashash (28): 26-27)⁷⁷

c) Firman Allah SWT

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَتَمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۚ

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya” (QS At-Thalaaq (65): 6)⁷⁸

⁷⁷ QS. Al-Qashash (28): 26-27.

⁷⁸ QS At-Thalaaq (65): 6

2) *Ijma'*

Mengenai diperbolehkannya sewa menyewa, semua ulama bersepakat bahwa sewa menyewa diperbolehkan. “Tidak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak signifikan.”⁷⁹

Dengan dua dasar hukum yaitu Al-Qur'an, dan *Ijma'* maka hukum diperbolehkannya sewa menyewa sangat kuat karena ketiga dasar hukum tersebut merupakan sumber penggalian hukum Islam yang utama. Dari beberapa dasar di atas, kiranya dapat dipahami bahwa sewa menyewa itu diperbolehkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentuk pada keterbatasan dan kekurangan.⁸⁰

2. Rukun Dan Syarat Sewa-Menyewa

a. Rukun Sewa Menyewa

Menurut Jumhur Ulama rukun sewa menyewa (*Ijarah*) adalah sebagai berikut:

1) Orang yang berakad (*Aqid*)

Dalam istilah hukum Islam orang yang menyewakan disebut dengan *mu'ajjir*, sedangkan orang yang menyewa disebut dengan *musta'jir*. Kedua belah pihak yang melakukan akad merupakan orang

⁷⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Terjemahan Tirmidzi* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013), h. 11.

⁸⁰ *Ibid.*

yang cakap bertindak dalam hukum yaitu mempunyai kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk (berakal) serta dewasa (*baligh*)”⁸¹

2) Adanya akad (*Ijab* dan *Qabul*)

Akad berasal dari bahasa Arab (العقد) yang berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan.⁸² Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, ‘*aqad* memiliki arti perikatan, perjanjian dan pemufakatan (*Al-Ittifaq*).⁸³

Menurut bahasa ‘*Aqad* mempunyai beberapa arti, antara lain:

- a) Mengikat, yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.⁸⁴
- b) Sambungan, yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.⁸⁵
- c) Janji, dalam perdata Islam disebut dengan *Wa’d*. Yaitu keinginan yang dikemukakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun ucapan dalam rangka memberikan keuntungan bagi

⁸¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 145.

⁸² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 114.

⁸³ Rahmawati Eka Nuraini, Ab Mumin, Akad Jual Beli Dalam Prespektif Fikih dan Praktiknya Dipasar Modal Indonesia, *Jurnal Al-‘Adalah* Vol. XII, No. 4 Desember 2015.

⁸⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 101.

⁸⁵ *Ibid.*

pihak lain. Adapun *muwa'adah* adalah janji kedua belah pihak (saling berjanji) untuk melakukan sesuatu pada masa yang akan datang.⁸⁶

Ijab dan *qabul* adalah suatu ungkapan antara dua pihak dalam sewa menyewa suatu barang atau benda. *Ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad dengan menggambarkan kemauannya dalam mengadakan akad. *Qabul* adalah kata yang keluar dari pihak yang lain sesudah adanya *ijab* untuk menerangkan persetujuannya.⁸⁷

Suatu akad dapat dipandang berakhir apabila telah mencapai tujuannya. Selain tercapainya tujuan, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan).

Fasakh terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:⁸⁸

- a) Di-*fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara'.
- b) Dengan sebab adanya *khiyar*.
- c) Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut dengan *iqalah*.
- d) Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan.
- e) Karena habis waktu.

⁸⁶Oni Sahroni, Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) h. 3.

⁸⁷Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 27.

⁸⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), h. 100.

- f) Karena tidak dapat izin dari pihak yang berwenang.
- g) Karena kematian.
- h) Sewa atau imbalan (*Ujrah*)

Uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut dengan *ujrah*. Pihak penyewa dan pihak yang menyewakan mengadakan kesepakatan mengenai harga sewa dimana antara keduanya terjadi penawaran. Pada dasarnya *ujrah* diberikan pada saat terjadinya akad sebagaimana dalam transaksi jual beli. Tetapi pada waktu akad para pihak dapat mengadakan kesepakatan seperti pembayaran boleh diadakan dengan mendahulukan imbalan atau mengakhirkan imbalan.⁸⁹

3) Manfaat atau obyek (*Ma'qud Alaih*)

Ma'qud alaih yaitu barang yang dijadikan obyek sewa menyewa. Syarat-syarat barang yang boleh dan sah dijadikan obyek sewa-menyewa adalah:⁹⁰

- (a) Obyek *ijarah* itu dapat diserahkan.
- (b) Obyek *ijarah* itu dapat digunakan sesuai kegunaan.
- (c) Obyek harus jelas dan terang mengenai obyek yang diperjanjikan.
- (d) Kemanfaatan obyek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan oleh agama.

⁸⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 30.

⁹⁰ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Fiqh Muamalah*, h. 231.

b. Syarat Sewa-Menyewa

Sewa menyewa dipandang sah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Pelaku sewa menyewa harus berakal

Kedua belah pihak dalam melakukan akad haruslah berakal (waras). Maka tidak akan sah anak kecil atau orang gila yang belum *mumayyis*.⁹¹ Secara umum sewa menyewa dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *ijarah* seharusnya orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukan, dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.⁹²

2) Ridho kedua belah pihak

Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini akad sewa menyewa tidak boleh dilakukan salah satu pihak, kedua-duanya atas dasar kesepakatan, baik keterpaksaan itu datang nya dari pihak pihak yang berakad atau dari pihak lain.⁹³

3) Objek sewa menyewa harus jelas manfaatnya

Barang yang disewa itu perlu diketahui mutu dan keadaannya demikian juga mengenai jangka waktunya, misalnya sebulan, setahun bahkan lebih. Pernyataan ini dikemukakan oleh fuqoha berlandaskan

⁹¹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, h. 320.

⁹² Helmi Karim, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 29.

⁹³ *Ibid.*

kepada *mashlahah*, karena tidak sedikit terjadi pertengkaran akibat sesuatu yang samar.⁹⁴

4) Objek sewa menyewa haruslah terpenuhi

Dengan demikian sesuatu yang diakadkan haruslah sesuatu yang sesuai dengan kenyataan (realitas), bukan sesuatu yang tidak berwujud dengan sifat yang *gharar*, maka objek yang menjadi transaksi diserahkan terimakan berikut dengan manfaatnya.⁹⁵

5) Objek sewa menyewa haruslah barang yang halal

Islam tidak membenarkan sewa menyewa atau perburuan yang terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, misalnya sewa menyewa rumah untuk perbuatan maksiat.⁹⁶

6) Pembayaran (uang) harus bernilai dan jelas

Jumlah pembayaran sewa menyewa haruslah dirundingkan terlebih dahulu, atau kedua belah pihak mengembalikan kepada adat kebiasaan yang sudah berlaku.⁹⁷

3. Macam-Macam Sewa-Menyewa

Pembagian *ijarah* biasanya dilakukan dengan memperhatikan objek *ijarah* tersebut. Ditinjau dari segi objeknya, akad *ijarah* menurut Ulama Fiqh terbagi menjadi dua macam :

- a) Ijarah '*ain* atau sewa menyewa yang bersifat manfaat, yaitu menyewa dengan memanfaatkan benda yang kelihatan dan dapat dirasa.

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, h. 321.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Terjemahan Tirmidzi*, h. 19-20.

Contohnya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang diperbolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka jumhur ulama sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.⁹⁸

b) *Ijarah immah* atau sewa menyewa yang bersifat pekerjaan, yaitu mengupahkan benda untuk dikerjakan dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.⁹⁹ Sewa menyewa seperti ini hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, misalnya buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang sepatu dan lain-lain.

Sewa menyewa seperti ini ada yang bersifat pribadi, misalnya menggaji seorang pembantu rumah tangga, tukang kebun dan satpam, serta sewa menyewa yang bersifat serikat yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, misalnya tukang sepatu, buruh pabrik dan tukang jahit. Kedua bentuk sewa menyewa terhadap pekerjaan ini hukumnya diperbolehkan.¹⁰⁰ Akad ini dalam Madzhab Syafi'i hampir sama dengan akad pesanan (*salam*), yang harus diperhatikan dalam *ijarah* ini adalah upah atau ongkos harus dibayar dimuka, sama seperti akad pesanan.¹⁰¹

⁹⁸ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, h. 662.

⁹⁹ Al-Ustadz Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'iyah* (Jakarta: Karya Indah, 1986), h. 83.

¹⁰⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, h. 662.

¹⁰¹ Ibn Taimiyah dan Ibn Qayim, *Hukum Islam Dalam Timbangan Akad dan Hikmah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 1975), h. 57.

4. Hikmah Sewa-Menyewa

Sewa-menyewa merupakan bentuk keluwesan dari Allah SWT untuk hamba-hambanya. Karena semua manusia mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan-kebutuhan primer tersebut akan terus melekat selama manusia masih hidup. Padahal, tidak seorang pun dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Sebab itulah Islam mengatur pola interaksi (bermuamalah) dengan sesamanya. Diantara sebab-sebab dan dasar-dasar yang telah tetap, tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun ialah segala yang terjadi dari benda yang dimiliki menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut.¹⁰²

Bentuk muamalah sewa-menyewa ini dibutuhkan dalam kehidupan manusia, karena itulah maka syariat Islam membenarkannya. Seseorang terkadang dapat memenuhi salah satu kebutuhan hidupnya tanpa harus melakukan pembelian barang karena jumlah uang yang terbatas. Adapun hikmah dari sewa-menyewa antarlain sebagai berikut:

- a. Dengan adanya sewa-menyewa maka dapat melaksanakan kegiatan muamalah.
- b. Dengan adanya sewa-menyewa dapat membantu memenuhi kebutuhan orang lain.
- c. Dengan adanya sewa-menyewa dapat mengarahkan golongan berada (ekonomi menengah ke atas) prihatin terhadap mereka yang memerlukan.

¹⁰²M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Cet. 1, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 427.

- d. Melahirkan masyarakat yang tolong-menolong.
- e. Dengan adanya sewa-menyewa tersebut seseorang dapat menerima faedah daripada barang yang disewakan.
- f. Saling memberikan manfaat kepada sesama manusia.
- g. Menghindari sifat barang yang mubazir.

Kita tidak dapat membayangkan betapa sulitnya kehidupan sehari-sehari, apabila sewa-menyewa ini tidak dibolehkan oleh hukum dan tidak mengerti tata caranya. Karena itu, sewa-menyewa diperbolehkan dengan keterangan syarat yang jelas dan dianjurkan kepada setiap orang dalam rangka mencukupi kebutuhan. Setiap orang mendapatkan hak untuk melakukan sewa-menyewa berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam syariat Islam yaitu memperjual belikan manfaat suatu barang.¹⁰³

5. Bekahir Sewa-Menyewa

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yang lazim membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mengakibatkan atau yang mewajibkan *fasakh*.¹⁰⁴ *Ijarah* akan menjadi (*fasakh*) batal apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a) Terjadinya cacat pada barang sewaan

Maksudnya bahwa pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada di tangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian pihak

¹⁰³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Terjemahan Tirmidzi*..., h. 201.

¹⁰⁴ Sohari Sahari, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 173.

penyewa sendiri, misalnya karena penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan barang tersebut. Dalam hal seperti ini pihak yang menyewakan dapat memintakan pembatalan.¹⁰⁵

b) Rusaknya barang yang di sewa

Apabila barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan atau musnah sama sekali sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan, misalnya terbakarnya rumah yang menjadi obyek sewa¹⁰⁶ dan demikian juga jika hewan yang menjadi obyek sewa mati maka akan berakhir masa sewanya.¹⁰⁷

c) Salah satu pihak meninggal dunia

Menurut ulama Hanafiyah sebagaimana telah dibahas dalam sifat akad di atas, hal tersebut dapat membatalkan akad. Sedangkan menurut mayoritas ulama tidak menyebabkan batalnya akad.

d) Masa sewa menyewa telah habis

Maksudnya jika apa yang menjadi tujuan sewa menyewa telah tercapai atau masa perjanjian sewa menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh para pihak, maka akad sewa menyewa berakhir.¹⁰⁸ Namun jika terdapat *uzur* yang mencegah *fasakh*, seperti jika masa sewa menyewa tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada ditangan penyewa sampai masa selesai

¹⁰⁵ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 57.

¹⁰⁶ *Ibid.*, h. 58.

¹⁰⁷ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Asas-asas Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), h. 155.

¹⁰⁸ *Ibid.*

diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya kerugian pada pihak penyewa, yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.¹⁰⁹ Namun apabila dalam akad sewa menyewa salah satu pihak baik penyewa maupun pemilik mengalami musibah yaitu kematian, maka akad sewa menyewa sebelum masa sewa habis akan tetap berlangsung dan diteruskan oleh ahli warisnya.¹¹⁰

e) Adanya *uzur*

Maksudnya *uzur* adalah sesuatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya, seorang yang menyewa toko untuk berdagang kemudian barang dagangannya musnah terbakar atau dicuri orang atau bangkrut sebelum toko tersebut dipergunakan, maka pihak penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa menyewa yang telah diadakan sebelumnya kepada pihak penyewa.¹¹¹

Sewa-menyewa sebagai akad akan berakhir sesuai kata sepakat dalam perjanjian. Dengan berakhirnya suatu sewa-menyewa ada kewajiban bagi penyewa untuk menyerahkan barang yang disewanya. Tetapi bagi barang-barang tertentu seperti rumah, hewan dan barang lainnya karena musibah, maka akan berakhir masa sewanya kalau terjadi kehancuran.¹¹²

¹⁰⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Terjemahan Tirmidzi*, h. 285.

¹¹⁰ D. Sirrojuddin Ar, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. 4 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 663.

¹¹¹ Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indoneisa*, (Bandar Lampung: Pemat Janet, 2016) h. 185.

¹¹² *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Adzim, Al-Hafidz Dzaqiyuddin bin Abdul Qawi Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim, terjemahan Pipih Imran Nurtsani & Fitri Nurhayati*, Jawa Tengah: Insan Kamil, 2015.

Al-Fauzan, Saleh, *Fiqih Sehari-Hari, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwan dan Budiman Musthofa*, Jakarta: Gema Insan Press, 2005.

Ali, Zainuddin *Hukum Perdata Islam di Indonesia* cet 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Anwar, Syamsul *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Teori Akad Dalam Fikih Mu'amalah* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Ar, D. Sirrojuddin, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. 4, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.

Ash Shiddieqy, M. Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Cet. 1, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Badrulzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994

Basyir, Abu Umar, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusaka Grafika, 2003.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Djamali, R. Abdul, *Hukum Islam Asas-asas Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1992.

Duswara Machmuddin, *Dudu Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa* Bandung: Refika Aditama, 2001.

F.X. Djumialdji, *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Fatwa DSN-MUI, No. 09/DSN-MUI/IV/2000, *Tentang Pembiayaan Ijarah*.

Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung Penerbit Alumni: 1982.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Hasan, Muhammad Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

HS, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Ibn Taimiyah dan Ibn Qayim, *Hukum Islam Dalam Timbangan Akad dan Hikmah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 1975.

Idris Ahmad, Al-Ustadz, *Fiqh Syafi'iyah*, Jakarta: Karya Indah, 1986.

J.Moleong, Lexy *Metode Pendekatan Kualitatif* Bandung: Remaja Rusda Karya, 2001.

Ja'far, Kumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indoneisa*, Bandar Lampung: Pematnet, 2016.

K. Lubis, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.

-----, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Miru, Ahmadi Dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Muhammad Azam, Abdul Aziz *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Nurachmad, Much. *Buku Pintar Memahami Dan Membuat Surat Perjanjian*, Cet.1, Jakarta, Transmedia Pustaka, 2010.

Pasaribu, Chairuman Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. III, Jakarta, Sinar Grafika, 2004.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Terjemahan Tirmidzi*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013.

Sahari, Sohari, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sahroni, Oni Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Sahroni, Oni M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Salim, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Soedjono, Wiwoho, *Hukum Perjanjian Kerja*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Soemadiparadja, Rahmat S.S, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa, Syarat-Syarat Pembatalan Perjanjian Yang Disebabkan Keadaan Memaksa/Force Majeur*, (Jakarta: Nasional Legal Program, 2010.

Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. VIII, Jakarta, Sinar Grafika.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005.

Subekti, *KUH Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1987.

Sugono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: LP2M UIN Raden Intan, 2015.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syariffuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fikih*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Syarifuddin, Amir *Ushul Fiqh*, Cet. Ke I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

Syarifuddin, Amir, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prananda Media, 2005.

Syihabbuddin Ahmad, Al Hafizh bin Ali bin Hajar Al Asqaiani, *Ringkasan Targhib wa Tarhib, terjemahan Abu Usamah Fatkhur Rokhman*, Jakarta: Pustaka Azam, 2006.

Taqiyuddin, Imam, *Kifayah al-Akhyar*, Semarang: Toha Putra, 1993.

W. Budiman N. P. D Sinaga, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005.

Widjaja, Gunawan, *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullenrecht) dalam Hukum Perdata*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Widjaya, *Terjemah Hadist Sahih Bukhari, Terjemahan Zainuddin Hamidy*, Jakarta: Bumirestu, 1951.

Wojowasito, S. *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoevo, 1990.

Wujowasito, S. *Kamus Umum Belanda Indonesia* Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoevo, 1990

Zaidan, Abdul Karim, *Pengantar Studi Syari'at Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*, Cet.1, Jakarta, Robbani Press, 2008.

Hadits

Al-Jaziry, Abdur Rahman, *Fiqh 'Ala Madzhabil Arba'ah, al Makkabah al-Bukhoiriyah al-Kubra*, Beirut: Dar al-Fikr.

Jurnal

Ratu, Desy Rebecca. Keadaan Terpaksa Sebagai Bagian Dari Daya Paksa Pasal 48 KUHP (Kajian Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 13 PK/PID.SUS/2014(2017) Dalam Jurnal *Lex Crimen* Vol. VI/ No. 10, Desember 2017.

Rachmawati, Eka Nuraini, Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia". *Al-Adalah Jurnal Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Vol. XII, No. 4, Desember 2015.

Mahmudah, Siti Reformasi Syari'at Islam, Kritik Pemikiran 'Abd Al-Karim Al-Adalah, Vol 13 No.1 2016.

Nur Sinta dan Saprudin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Overmacht* Dalam Perjanjian Pemborongan Pembuatan Irigasi: Studi Kasus di Desa Punti Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima dalam Jurnal *Muamalat*, Vol VIII, No 2, Desember 2016.

Sumber Online

Astari Suryo Nastiti, “Analisis *Force Majeur* di Dalam Suatu Kasus Wanprestasi Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa (Studi kasus Paulus vs PT. Agro Asia Manunggal, Putusan Nomor 14/ Pdt.G/ 2010/ PN. Menggala)”, *Skripsi* Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2013

<https://bangka.trimbunnews.com/2020/03/24/pengertian-lengkap-apa-itu-virus-corona-covid-19-gejala-cara-penularan-hingga-pencegahan> (11 Juni 2020)

Nova Noviana, *Force Majuer* Dalam Perjanjian (Studi Kasus di PT. Bosowa Resources), *skripsi* Makasar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2016

Zikmatun Zakotin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Overmacht* Dalam Perjanjian Borongan, *Skripsi* Yogyakarta: Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004.

Wawancara

Bapak Andre dan Ibu Suci, Pengguna Jasa *Wedding Organizer* Amin Salon, **Wawancara**, Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu , 05 Agustus 2020.

Bapak Eko Septiawan dan Rika Cahya, Pengguna Jasa *Wedding Organizer* Amin Salon, **Wawancara**, Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu , 02 Agustus 2020.

Bapak Irfan Setiawan Dan Indah Lestari, Pengguna Jasa *Wedding Organizer* Amin Salon, **Wawancara**, Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu , 01 Agustus 2020.

Bapak Reyhan Dan Nur, Pengguna Jasa *Wedding Organizer* Amin Salon, **Wawancara**, Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, 10 Agustus 2020.

Bapak Yunus Dan Icha, Pengguna Jasa *Wedding Organizer* Amin Salon,
Wawancara, Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu ,
10 Agustus 2020.

Ibu Jesica Zulfiana, Pengguna Jasa *Wedding Organizer* Amin Salon, **Wawancara**,
Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu , 01 September
2020.

Ibu Lenni, Pengguna Jasa *Wedding Organizer* Amin Salon, **Wawancara**, Desa
Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, 02 September 2020.

Ibu Mardiana dan Rizky, Pengguna Jasa *Wedding Organizer* Amin Salon,
Wawancara, Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu,
03 September 2020.

Ibu Purwanti, Pengguna Jasa *Wedding Organizer* Amin Salon, **Wawancara**, Desa
Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, 08 Agustus 2020.

Ibu Siti Aminah, Pemilik Atau *Owner Wedding Organizer* Amin Salon,
Wawancara, Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu , 1
Agustus 2020.

